

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusianya, keanekaragaman itulah yang membuat potensi destinasi wisata di Indonesia semakin dikenal luas. Maka dari itu pemerintah Negara Republik Indonesia membuat kebijakan dimana sektor pariwisata memiliki peran penting dalam roda perekonomian di Indonesia sehingga pariwisata di anggap sebagai salah satu sumber sektor ekonomi penting bagi negara karena dapat membantu ketahanan perekonomian daerah. Sebagai sumber ekonomi penting, pariwisata mendapatkan perhatian dari pemerintah, dikeluarkannya Undang-undang Tahun 2009 No 10 tentang kepariwisataan adalah sebagai dasar pijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Penyelenggaraan Kepariwisata menurut Undang-Undang pasal 4 bertujuan untuk, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan, mempererat persahabatan antar bangsa (Kepariwisata, 2019)

Pariwisata menjadi sektor terbesar dalam menyumbang devisa negara. Selain itu pariwisata juga memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti pemanfaatan sumber daya dan modal kepariwisataan secara optimal. Setiap daerah memiliki pesona atau daya tarik pariwisata yang berpotensi dapat mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto yang memiliki luas wilayah 20,21 km². Hal tersebut menjadikan Kota Mojokerto dinobatkan sebagai salah satu Kota Terkecil di Indonesia. Memiliki luas wilayah yang tidak begitu luas maka Kota Mojokerto memiliki potensi wisata yang terbatas pula. Hal tersebut menjadi tantangan bagi

pemerintah Kota Mojokerto untuk terus melangkah dan terus berbenah dalam mengembangkan dan mempromosikan daya tarik pariwisata kota Mojokerto agar di kenal oleh masyarakat luas. Sehubungan dengan dikeluarkannya Perpres yaitu Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas “Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkartosusila” (UU No 80 Tahun 2019, 2019). Maka pemerintah Kota Mojokerto melakukan percepatan pembangunan salah satunya dalam sektor pariwisata, yang di harapkan memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang berintegrasi dan berkelanjutan. Selanjutnya kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 24 Tahun 2019 tentang RIPPAR (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Mojokerto) 2019-2034 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sektor Pariwisata menjadi salah satu opsi pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam Implementasinya pariwisata di Kota Mojokerto memiliki regulasi yang jelas. Intervensi (campuran) pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memberikan *incentive* (dorongan atau stimulus) dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Menurut sumber data dari RENSTRA 2018-2023 DISPORAPAR, Kota Mojokerto juga memiliki potensi atau peluang wisata dalam bidang perbelanjaan. Hal tersebut terjadi karena perkembangan pembangunan pertokoan yang tumbuh dengan pesat. Tidak hanya itu, jasa usaha bidang pariwisata seperti Hotel, Restoran yang sudah tersedia di Kota Mojokerto perlu di tingkatkan kembali yang nanti akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mojokerto. Disini peneliti tertarik dengan Komunikasi Pemerintahan yang diterapkan Disporapar dalam

mempromosikan Daya Tarik Wisata Kota Mojokerto Dengan Konsep *Pentahelix*. Sejak tahun 2020 Pemerintah Kota Mojokerto terus melakukan perubahan dan pembenahan salah satunya dalam sektor pariwisata. Saat ini Pemerintah Kota Mojokerto mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata yang berbasis sejarah dan budaya dengan mengusung tema “*The Spirit Of Majapahit*”. Jika di lihat, Kota Mojokerto memiliki sumber daya pariwisata yang terbatas, hal yang mendasari yaitu salah satunya keadaan geografis kota Mojokerto yang sebagian besar dataran rendah. Namun hal tersebut tidak membatasi pemerintah Kota Mojokerto untuk terus mengembangkan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan atau membuat inovasi, seperti meningkatkan pengembangan potensi daya tarik wisata yang memiliki peluang besar untuk dapat berkembang. komunikasi pemerintahan untuk menjalin kerjasama atau *partnership*, sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutam untuk mewujudkan *good public governance* di dalam sektor pariwisata di dalamnya terdapat lima pemangku kepentingan atau biasa di sebut sebagai *Pentahelix* yang saling berkoordinasi yaitu pemerintah, komunitas (Pokdarwia), sektor swasta, media, dan akademisi yang menempati posisi penting dalam pengembangan dan promosi Daya Tarik Wisata Kota Mojokerto. Hal tersebut tidak lepas dari Komunikasi , dimana hal itu menunjukkan berbagai tindakan pemerintahan seperti penyampaian regulasi atau kebijakan yang dibuat dan di laksanakan oleh birokrasi pemerintahan yang dalam kaitannya dengan kepentingan publik atau masyarakat atau dunia usaha. Jadi komunikasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses penyampaian atau penyebaran informasi oleh Dinas Pariwisata kepada pemangku kepentingan yang terlibat atau turut berkontribusi dalam kebijakan promosi Daya Tarik Wisata Kota Mojokerto atau sebaliknya. Dari proses penyampaian atau penyebaran informasi itulah dapat kita ketahui pola komunikasi yang terjadi diantara Dinas Pariwisata Kota Mojokerto dengan lima pemangku kepentingan. Dalam proses penyampaian informasi publik mengenai kebijakan promosi Daya Tarik Wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Mojokerto kepada lima pemangku kepentingan itu peneliti akan mengetahui apakah komunikasi pemerintahan dalam perspektif *good public governance* di terapkan. Jadi fokus penelitian ini peneliti ingin mengetahui komunikasi pemerintahan yang di terapkan Dinas Pariwisata kepada komunitas, sektor swasta, media dan akademisi sebagai bentuk dari implementasi

kepemerintahan sektor publik yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Kepariwisataaan dalam mempromosikan Daya Tarik Wisata di Kota Mojokerto dengan Konsep *Pentahelix*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Kepariwisataaan dalam mempromosikan daya tarik wisata di Kota Mojokerto dengan Konsep *Pentahelix* .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun 2 manfaat penelitian di dalam penelitian ini sebagai berikut,manfaat akademis adalah manfaat ilmu baru yang akan didapatkan bagi penulis maupun pembaca, kemudian manfaat praktis adalah manfaat yang nantinya akan di dapatkan oleh pihak instansi terkait atau subjek terkait :

1.4.1 Manfaat Akademis

Pertama, Memberikan sumbangsih dengan menambah khasanah ilmu keorganisasian khususnya yang mengarah pada kajian ilmu pemerintahan. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan wawasan bagi peneliti serta para pembaca mengenai Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Kepariwisataaan dalam mempromosikan daya tarik wisata di Kota Mojokerto dengan Konsep *Pentahelix*. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang pemerintahan